

## FOKUS DAN RUANG LINGKUP

Jurnal Penelitian Hukum De Jure memfokuskan pada bidang Hukum, menerima naskah karya tulis ilmiah hasil penelitian di bidang hukum, dan tinjauan hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain.

## LEMBAGA PENERBIT

Jurnal Penelitian Hukum De Jure diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM R.I.

p-ISSN 1410-5632

e- ISSN 2579-8561

Edisi jurnal elektronik tersedia pada:

<http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure>

## INDEKSASI

Google Scholar; Indonesian Scientific Journal Database (ISJD); Public Knowledge Project (PKP) Index; CiteULike; Academic Research Index (Research Bib); Zotero; Indonesia One Search; Neliti; dan Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

## FREKUENSI PUBLIKASI

Terbit sebanyak empat kali dalam setahun, pada bulan Maret, Juni, September dan Desember.

## KETENTUAN BIAYA PUBLIKASI ARTIKEL

Setiap artikel yang disampaikan ke Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum tidak dikenakan 'Biaya Pemrosesan Artikel'. Ini mencakup review mitra bestari, pengeditan, penerbitan, pemeliharaan dan pengarsipan, dan memungkinkan akses langsung ke versi teks lengkap dari artikel.

## ALAMAT KORESPONDENSI

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Jalan H.R. Rasuna Said  
Kavling 4-5, Jakarta Selatan 12940  
Telepon 021- 2525015  
Faksimili 021-2526438  
Laman :  
[www.balitbangham.go.id](http://www.balitbangham.go.id)  
Email:  
[ejournaldejure@gmail.com](mailto:ejournaldejure@gmail.com)

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Indexed by:



PKP|INDEX



zotero





Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (*Maret, Juni, September dan Desember*) diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI) Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya dan kalangan masyarakat pemerhati hukum pada umumnya.

**Penanggung Jawab**

Ma'Mun, Bc.I.P., S.H., M.H.

(Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

**Pemimpin Umum**

Henry Donald Lbn Toruan, S.H.,M.H.

(Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia)

**Wakil Pemimpin Umum**

T. Daniel L Tobing, S.H.,

(Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Peneliti Hukum dan Hak Asasi Manusia)

RR. Risma Indriyani, S.H.,M.Hum

(Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum)

**Pemimpin Redaksi**

Ahyar Ari Gayo, S.H.,M.H., APU (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

**Anggota Dewan Redaksi**

Marulak Pardede, S.H., M.H., APU (Hukum Ekonomi BALITBANGKUMHAM)

Syprianus Aristieus, S.H., M.H (Hukum Perusahaan, BALITBANGKUMHAM)

Jamilus, S.H., M.H (Hukum Perdata, BALITBANGKUMHAM)

Nevey Varida Ariani, SH., M.H, (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)

Eko Noer Kristiyanto, S.H, M.H. (Hukum Tata Negara, BALITBANGKUMHAM)

Muhaimin, S.H., (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

**Redaksi Pelaksana**

Fitriyani, S.H.,M.Si.

Jaya Laksana, S.E

**Sekretariat**

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si.,M.P

Asmadi, S.H

**Tata Usaha**

Dra. Evi Djuniarti, M.H

Suwartono

**Teknologi Informasi dan Desain Layout**

Risma Sari, S.Kom.M.Si (Teknologi Informasi)

Machyudhie, S.T. (Teknologi Informasi)

Saefullah, S.ST.,M.Si., (Teknologi Informasi)

Agus Priyatna, S.Kom. (Desain Layout)

**Mitra Bestari**

1. Prof. Dr. Hibnu Nugroho  
Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Univ. Jenderal Soedirman, Purwokerto
2. Dr. Mohd. Din, S.H., M.H.  
Hukum Pidana, Fakultas Hukum Univ. Syiah Kuala, Banda Aceh
3. Dr. Dra. Farhana, S.H., M.H., M.Pd.  
Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
4. Dr. Drs. Ridwan Nurdin, MCL.  
Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
5. Dr. Hadi Supratikta, M.M.  
Hukum Administrasi Negara, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

**Alamat Redaksi:**

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM  
Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia  
Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Lantai 7, Kuningan, Jakarta Selatan  
Telefon (021) 2525015, Faksimili (021) 2526438

**Email :**

balitbangkumham@gmail

jurnaldejure@yahoo.com

ejournaldejure@gmail.com

**Percetakan**

**PT Pohon Cahaya**

Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440  
Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual di bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritis, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi rangkap dikirim melalui Email jurnaldejure@yahoo.com atau melalui aplikasi Open Journal System (OJS) pada URL/website: ejournal.balitbangham.go.id.

**DAFTAR ISI**

Halaman

**DAFTAR ISI**

**ADVERTORIAL**

**KUMPULAN ABSTRAK**

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia

*(Enforcement of National Arbitration Award in Indonesia)* ..... 309 - 320

**Mosgan Situmorang**

Kedudukan Hakim dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan Terorisme  
untuk Mewujudkan Akuntabilitas Hukum

*(Judge Position in The Reformation of Criminal Justice System*

*Against Terrorism as a Form of Legal Accountability)* ..... 321 - 334

**Budi Suhariyanto**

Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 Terhadap Pemberantasan  
Money Laundering Perbandingan Indonesia dengan Tiga Negara Lain

*(The Influence of Decision of The Constitutional Court No. 77/ PUU-XII/2014*

*on The Eradication of Money Laundering - Comparing Indonesia to The Other Three Countries)* ..... 335 - 349

**Ajie Ramdan**

Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana  
antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran

*(Reciprocal Judiciary Assistance Agreement in The Criminal Matters*

*Between The Republic of Indonesia and The Islamic Republic of Iran)* ..... 351 - 371

**Firdaus**

Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

*(Law Enforcement Within The Scope of Spatial Lay-Out*

*for The Purpose of Sustainable Development)* ..... 373 - 390

**Muhar Junef**

Perlindungan Hak Korban Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Kendal

*(Protection of Rights of The Victims of Land Procurement Process for Toll Road Construction*

*in Kendal District)* ..... 391 - 409

**Agus Surono**

Pendekatan Humanis dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan <i>(Humanism Approach in Handling Juvenile Perpetrator of Drug Abuse - A Case Study In South Sulawesi Province)</i> .....	411 - 427
<b>Yuliana Primawardani &amp; Arif Rianto Kurniawan</b>	
Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan <i>(Putting Convicted Terrorists in Correctional Institution)</i> .....	429 - 443
<b>Insan Firdaus</b>	
Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata <i>(The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law And Civil Code)</i> .....	445 - 461
<b>Evi Djuniarti</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b> .....	445 - 461
<b>PEDOMAN PENULISAN</b> .....	463 - 465

## ADVERTORIAL

Puji syukur kehadirat Allah SWT, edisi keempat *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* yang diterbitkan **Ikatan Peneliti Hukum Indonesia** bekerjasama dengan **Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI** dapat kembali dihadirkan melalui Volume 17 Nomor 4 Desember 2017. Penerbitan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* di edisi ini memuat 8 (delapan) tulisan dengan materi hukum yang beragam, seperti putusan arbitrase, kedudukan hakim dalam pembaharuan sistem hukum, *mutual legal assistance*, serta perlindungan hukum kepada korban pengusuran, anak penyalahguna narkoba maupun pelaku tindak pidana teroris di lembaga pemasyarakatan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada penulis yang telah memberikan kepercayaan kepada *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* untuk menerbitkan hasil karyanya. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengelola jurnal yang telah berupaya mengoperasikan *open journal system* secara konsisten untuk penerbitan jurnal di tahun 2017. Semoga pengelolaan jurnal melalui *open journal system* di tahun depan dapat ditingkatkan kualitasnya sesuai standar yang berlaku.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI** dan **Ikatan Peneliti Hukum Indonesia** yang telah berkenan dalam penerbitan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. DR.. Hibnu Nugroho, S.H.,MA, Bapak Dr. Mohd. Din, S.H., M.H., Ibu DR. Farhana, S.H.,M.H., Bapak DR. Hadi Supraptikta, Bapak DR. Ridwan Nurdin, MA selaku Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis.

Jakarta, Desember 2017

**Redaksi**





The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

**Mosgan Situmorang (A Researcher of Law Research and Development Centre, The Agency of Research and Development of Law and Human Rights)**

***Enforcement of National Arbitration Award in Indonesia***

*Law Research Journal De Jure, 2017 December, Volume 17, Number 4, Page 309 - 320*

*The most important issue in a dispute is, the enforcement of a verdict or judgement on the dispute or often called as an execution. It will be useless to have a final and binding judgement only to see that the decision is unenforceable. In the civil cases, there are at least 2(two) important institutions that may be relied on in settling the dispute, i.e. the court and the arbitration center. The arbitration center may examine the dispute in a fairer and faster manner, however it has no organs to force the non-favored party to discharge his or her obligations under the awards, Therefore the role of the district court is needed. There are some requirements to meet for a court to enforce the award, among others are that the execution should be made within 30 (thirty) days from the issuance of award, the original or authentic copy of the arbitral award must have been submitted and registered by the arbitrator or his proxy to the clerk of the district court. Non-fulfillment of the requirements above will render the arbitral award unenforceable. The first issue in this study is, what is the role of the courts in the enforcement of the national arbitration award and the second is, what is the benefits of entering the arbitration award to the district court. The method used in this research is the normative juridical method, and consequently the data is secondary data. From the research one may conclude that there are two main roles a district court should play, the first is to accept the registration of the award and the second is to execute the award if the losing party is not willingly to discharge their respective obligations. An arbitration award not registered by the Arbitrator within 30 days from the issuance will render the arbitral award unenforceable. The recommendation of the research, it is necessary to revise the Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, in particular the provisions on the registration of arbitral award.*

**Keywords: *Enforcement of Arbitration Award***

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

**Budi Suhariyanto (A Researcher at the Research and Development Center for Law and Justice The Supreme Court )**

***Judge Position in The Reformation of Criminal Justice System Against Terrorism as a Form of Legal Accountability***

*Law Research Journal De Jure, 2017 December , Volume 17, Number 4, Page 321 - 334*

*The growing operations and increasingly sophisticated form of terrorism need to be addressed with reformation to the criminal justice system and special form of law enforcement. For the purpose of legal accountability, the law enforcement against the specific crime of terrorism requires authorities to oversee the judges in order to prevent abuse of power. It is also worth to consider the judge position in the criminal justice system against the alleged terrorist according to the applicable laws and the urgency of the judge involvement in the reformation of the criminal justice system during the revision of the terrorism eradication laws for the purpose of legal accountability. Normative research method is used to find the answer for the issue. The answer will be useful as input for the House of Representative and the Government who are now discussing the revision of the terrorism eradication laws. Normatively the Law 15 of 2003 on Combating Terrorism and the Law No. 9 of 2013 on the Prevention and Eradication of Terrorism Financing should constitute the basis for classifying the terrorism act as a crime over the years. As their forms and modus operandi grow, it is necessary to reform the criminal justice system that grants the law enforcers special authorities in the prevention and prosecution of terrorism. For the purpose of legal accountability, judges require specific function and authorities in the investigation and investigation and prosecution process. Control models in the forms of commissioner judges or strengthening pretrial institution may be used to materialize the due process of law.*

**Keywords: Judge, Terrorism, Legal Accountability**

**Ajie Ramdan (Lecturer at the Department of Criminal Law, Faculty of Law, University of Padjadjaran)**

***The Influence of Decision of The Constitutional Court No. 77/PUU-XII/2014 on The Eradication of Money Laundering - Comparing Indonesia to The Other Three Countries***

*Law Research Journal De Jure, 2017 December , Volume 17, Number 4, Page 335 - 349*

*Money laundering is an attempt to disguise the origin of property resulted from the proceeds of a crime as if the property is derived from legal activities. Is the crime stand-alone or dependant to the other crimes? This article examines the evidencing process of money laundering by studying and analyzing the Decision of Constitutional Court No. 77 / PUU-XII / 2011 and comparing the money laundering crimes in Indonesia and the other three countries, the Netherlands, England, and United States of America. The Constitutional Court decision has strengthened the legal basis for the law enforcers to enforce the criminal law in the eradication of money laundering. In conclusion money laundering can not stand alone. Comparing the money laundering in Indonesia to its counterparts, Netherlands, United Kingdom and America has concluded that the money laundering crime is a derivative crime. For the purpose of Equality Before The Law, the Government and House of Representatives should have revised the Law No. 8 of 2010. In the process of money laundering eradication in Indonesia, the law enforcers should pay more attention to the principle of presumption of innocent.*

**Keywords: Money Laundering, Constitutional Court Decision, Comparison**

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

**Firdaus (A Researcher at the Human Rights Research and Development Center, The Agency for Research and Development of Law and Human Rights)**

***Reciprocal Judiciary Assistance Agreement in The Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The Islamic Republic of Iran***

*Law Research Journal De Jure, 2017 December , Volume 17, Number 4, Page 351 - 371*

*The development of science and technology, in particular the transportation, communications, and information has eliminated the boundaries between one country and another rendering the movement of people or goods from one country to another easier and quicker. This development has created some impacts to the crimes and their increasingly sophisticated operations, consequently the mitigation of the same would require cooperation between the countries. One of the efforts in overcoming the issue is by establishing good bilateral relations with another country of similar interests in the form of reciprocal juridical assistance on criminal matters. This research uses the normative juridical and juridical empirical approaches and aimed to answer the urgency of reciprocal juridical assistance agreement and ratification thereof in criminal matters, and to identify substantial provisions of the reciprocal juridical assistance agreement in the criminal matters. This paper focuses on the urgency to support the ratification of the reciprocal juridical assistance agreement of criminal matters in relation to narcotics and acts of terrorism as well as the substantial provisions of the reciprocal juridical assistance agreement in criminal matters. This paper recommends immediate ratification of the agreement subject to the applicable national laws, and strengthening some agencies to support the performance of the reciprocal juridical assistance agreement in criminal matters between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran.*

**Keywords: Agreement, Assistance, Reciprocity, Criminal**

**Muhar Junef (A researcher of Law Research and Development Centre, The Agency of Research and Development of Law and Human Rights)**

***Law Enforcement Within The Scope of Spatial Lay-Out for The Purpose of Sustainable Development***

*Law Research Journal De Jure, 2017 December , Volume 17, Number 4, Page 373 - 390*

*The law enforcement process on violation against spatial lay-out regulation is very important in revitalizing the spatial lay-out plan map. One of the issues that is often found in the implementation process of the spatial lay-out plan is the law enforcement process. As many violations of a spatial lay-out regulations are left unprosecuted. This has caused the violation being legalized by means of revising the existing spatial lay-out plan. The issue to this research is the current law enforcement on violation against spatial lay-out planning and how to realize sustainable spatial lay-out planning? To investigate the existing issues, this study uses normative research method. The research concludes that the law enforcement of violation against spatial lay-out regulations in Indonesia has already had the Law No. 26 of 2007 regarding Spatial Lay-out that divides the violations into four regimes, i.e. administrative, civil, state administration, and criminal. Creating the sustainable spatial lay-out requires harmony between the natural and artificial environments, integrated utilization of natural resources and artificial resources by observing also the human resources as well as the protection of spatial function and the prevention of negative impacts on the environment due to space utilization.*

**Keywords: Law Enforcement, Spatial Lay-out Planning**

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

**Agus Surono (A Lecturer at the Faculty of Law, University of Al Azhar Indonesia)**

***Protection of Rights of The Victims of Land Procurement Process for Toll Road Construction in Kendal District***

*Law Research Journal De Jure, 2017 December , Volume 17, Number 4, Page 391 - 409*

*Judicially, the Law no. 2 of 2012 on Land Procurement has provided assurance of legal certainty and justice, however many administrative faults have been found during the land procurement process for the toll road construction in Kendal Regency, that in turn may adversely impact the people affected by the toll road development. The land acquisition process for the construction of toll roads in 27 villages in Kendal Regency, the province of Central Java has failed to observe the rights of the victims amid the tendency of demonstrating intimidation and violation of human rights, as well as many administrative errors in the acquisition stage the land rendering it non-compliant with the provisions of the Law no. 2 of 2012 on Land Procurement. Based on this background, the following issues may be raised: firstly, whether the land acquisition system for toll road construction as stipulated in the Law No. 2 of 2012 on Land Procurement has provided the victims with adequate legal protection? Secondly, whether the rights of the victims of the land procurement process for toll road infrastructure construction have been assured of their legal certainty and justice as regulated in the land laws and regulations? Thirdly, whether the realization process of land procurement for the construction of toll road infrastructure in Kendal District has provided the victims with adequate legal protection and justice? The research uses juridical normative legal research approach, while the data used in this study are secondary data and supported by the data from interviews and field observations when the researcher was advocating some local victims of the land procurement process for the construction of toll roads in Kendal, as a form of the researcher's community service. Further, the data were collected and analyzed by using qualitative analysis methods. Based on the analysis and discussion, the followings are concluded: firstly, the system of land procurement for toll road development as regulated in Law no. 2 of 2012 on Land Procurement substantially has provided adequate legal protection for the victims, in particular the people who are entitled to compensation, but there were many problems during the implementation. Secondly, the Law no. 2 of 2012 on Land Procurement has provided legal certainty to the rights of the victims of land procurement process for the construction of toll roads, but in reality there were various administrative errors highly detrimental to the people affected by the toll roads construction. Thirdly, the implementation of land acquisition for the construction of toll road infrastructure in Kendal Regency has failed to guarantee legal protection and justice for the victims. The recommendations include the followings: firstly, it is necessary to socialize the regulations on land procurement/acquisition so that the locals may understand their rights. Secondly, it is necessary to involve the supervisors to both the agencies and law enforcers in order to prevent practices of administrative error, manipulation and markup.*

**Keywords: Protection, Victim Rights, Toll Road**

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.  
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

**Yuliana Primawardani & Arief Rianto Kurniawan (Researchers at the Human Rights Research and Development Center, The Agency for Research and Development of Law and Human Rights)**

***Humanism Approach in Handling Juvenile Perpetrator of Drug Abuse - A Case Study In South Sulawesi Province***

*Law Research Journal De Jure, 2017 December , Volume 17, Number 4, Page 411 - 427*

*Juvenile drug abuser should be treated in different ways from the other children in conflict with the laws. As the treatment needs humanism approach in connection with the special protection to which the children are entitled as may be provided for in the Law of the Republic of Indonesia No. 35 of 2014 regarding Amendment to the Law No. 23 of 2002 regarding Child Protection. The purpose of this study is to identify general overview on the treatment of juvenile drug abuses and the rehabilitation (medical and social) policies applied to the juvenile drug abuser. The research uses a qualitative approach. The research concludes that: Firstly, viewed from the treatment aspects, one may see that the Laws of Juvenile Justice System has not been appropriately applied. One of the reasons is the different perceptions among the law enforcers that may have resulted the different treatment to the juvenile drug abusers. In addition, the Integrated Assessment Team has not successfully implemented its programs due to lack of roles played by the Correctional Institution in the Integrated Assessment Team. Secondly, the rehabilitation policy is applied to juvenile drug abusers only during the pre-trial stage and as long as it is not a relapsed act. In addition, there were many juvenile offenders who have abused drugs, not provided with rehabilitation under the judge's decision, and they must serve prison sentences. It is therefore recommended that rehabilitation should be humanism approach in providing special protection to the children without prejudicing to the law enforcement process by placing the children in the Juvenile Correctional Institutions (LPKA). Also, when establishing an Integrated Assessment Team, a Correctional Institution should be immediately appointed as a member of the Team and to play its roles of advocacy and counsel in treating the children in conflict with the law.*

**Keywords: Humanism Approach, Children Drug Abuser**



The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.  
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

**Insan Firdaus (A Researcher at the Policy Research and Development Center, The Agency for Research and Development of Law and Human Rights)**

***Putting Convicted Terrorists in Correctional Institution***

*Law Research Journal De Jure, 2017 December, Volume 17, Number 4, Page 429 - 443*

*Convicted terrorists are classified as high-risk prisoners who require special treatment and counsel, therefore, the convicted terrorists should carefully be put in prisons as they would influence the success of the counsel and de-radicalization processes. The issues raised by this research are firstly, whether the terrorist prisoners have been placed in accordance with the applicable mechanisms? Secondly, the aspects that should be considered in putting the convicted terrorists in prison and thirdly, the obstacles that may be encountered during the processes. The research uses juridical empiric method and is descriptive with the aim to identify the mechanisms of putting the convicted terrorists in correctional institutions, aspects and obstacles for consideration. Placements of convicted terrorist in correctional institutions have been made in accordance with the mechanisms prescribed by the penal law, i.e. by applying the security and counseling approaches through the profiling and assessment processes in every stage of placement. Aspects to be considered in placing the convicted terrorists are the levels of risks and radicalism, human resources development and infrastructures and facilities of the prison. While the obstacles include over capacity, limited resources of wardens both in quantity and quality and the institution's infrastructure and facilities. Based on the study, the followings are, among others, the recommendations for the Directorate General of Corrections: it is necessary to improve the competence of the wardens, closer cooperation with the National Agency for Terrorist Countermeasures, and the prison must be supported with adequate facilities and infrastructure.*

**Keywords:** *Convicted Terrorist, Correctional Institution*

**Evi Djuniarti (A Researcher of Law Research and Development Centre, The Agency of Research and Development of Law and Human Rights)**

***The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law And Civil Code***

*Law Research Journal De Jure, 2017 December, Volume 17, Number 4, Page 445 – 461*

*Marital wealth is a very big problem in married life, especially when they divorce, so the Law of Marital Treasure has played an important role in family life even when marriage is still running smoothly. It would be difficult to understand how the survival of a marriage if in the marriage is not supported by the existence of wealth. Given the importance of family property in a marriage, this research would like to recognize how the common property is viewed from the perspective of marriage law and the Civil Code. The method used in this research is normative research method, or literature study that is a research conducted or based on the provisions that should be. The study found that. Under the terms of the marriage law that property acquired during marriage becomes a common property. Formally juridical can be understood the sense of common property is the husband and wife property acquired during marriage. While in Article 124 paragraph (1) and paragraph (2) of the Civil Code it is stipulated that, "Husbands themselves shall take care (own beheren) of marriage property, without the interference of wives, husbands are allowed to sell, transfer and burdens The conclusion of the research that property is not entitled to the rights of each can not be owned, can not be combined. All the property obtained from the carriage of the parties before marriage can be used together for the common interest in the household.*

**Keywords:** *Law, Property, Together*

**Kata kunci bersumber dari artikel****Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya**

**Mosgan Situmorang (Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)**

**Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Di Indonesia**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Desember 2017, Volume 17, Nomor 4, Halaman 309 - 320

Hal terpenting suatu sengketa adalah pelaksanaan putusan atas sengketa tersebut atau sering disebut dengan istilah eksekusi. Adalah sia-sia apabila dalam suatu perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, akan tetapi pada akhirnya tidak dapat dieksekusi. Di dalam perkara perdata paling tidak ada dua lembaga penting yang dapat menjadi tempat penyelesaian suatu perkara, yakni lembaga pengadilan dan arbitrase. Badan Arbitrase dapat melaksanakan pemeriksaan sengketa secara adil dan lebih cepat akan tetapi Badan Arbitrase tidak punya organ untuk dapat memaksa pihak yang kalah melaksanakan putusannya, seperti layaknya pengadilan yang mempunyai juru sita untuk melaksanakan eksekusi. Oleh karena itu dibutuhkan peranan pengadilan negeri. Agar pengadilan dapat melakukan eksekusi maka ada syarat yang harus dipenuhi yakni dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh ) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembaran asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri. Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Adapun yang menjadi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimanakah peran pengadilan dalam pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan yang kedua apakah manfaat pendaftaran putusan arbitrase di pengadilan negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Normatif Yuridis dengan demikian datanya adalah data sekunder. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa ada dua hal pokok yang menjadi peran Pengadilan Negeri yakni yang pertama untuk menerima pendaftaran putusan dan yang kedua adalah untuk melakukan eksekusi apabila para pihak tidak melaksanakan secara suka rela. Konsekuensi suatu perkara arbitrase yang tidak didaftarkan oleh Arbiter dalam jangka waktu 30 hari sejak diputus berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Dari hasil penelitian, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya ketentuan mengenai pendaftaran putusan arbitrase.

**Kata Kunci: Pelaksanaan Putusan Arbitrase**

**Kata kunci bersumber dari artikel****Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya**

**Budi Suhariyanto (Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung R.I.)**

**Kedudukan Hakim Dalam Pembaruan Sistem Pidanaan Terorisme Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Hukum**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Desember 2017, Volume 17, Nomor 4, Halaman 321 - 334

Berkembangnya modus operandi dan bentuk kejahatan terorisme yang semakin canggih perlu ditanggulangi dengan pembaruan kriminalisasi dan penegakan hukum yang bersifat khusus. Demi mewujudkan akuntabilitas penegakan hukum terorisme yang khusus tersebut maka diperlukan juga kewenangan kontrol dari hakim agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Patut dipertanyakan bagaimana eksistensi hakim dalam sistem pidana pelaku terorisme menurut perundang-undangan dan bagaimana urgensi kedudukan hakim dalam pembaruan sistem pidana dalam revisi undang-undang pemberantasan terorisme untuk mewujudkan akuntabilitas hukum. Metode penelitian normatif digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut. Jawaban atas permasalahan tersebut berguna sebagai masukan bagi DPR dan Pemerintah yang sedang membahas revisi undang-undang pemberantasan terorisme. Secara normatif UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme dan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme menjadi dasar pidana pelaku terorisme selama ini. Seiring berkembangnya bentuk dan modus operandi maka diperlukan pembaruan sistem pidana baru yang memberikan kewenangan khusus dalam hal pencegahan dan penindakan terorisme oleh penegak hukum. Demi akuntabilitas hukum, maka diperlukan fungsi dan kewenangan kontrol dari hakim pada tahap penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan di persidangan. Model kontrol berupa hakim komisaris atau penguatan lembaga pra peradilan dapat dijadikan sarana mewujudkan *due process of law*

**Kata Kunci: Hakim, Terorisme, Akuntabilitas Hukum**

**Ajie Ramdan (Dosen pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran)**

**Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 Terhadap Pemberantasan *Money Laundering* Perbandingan Indonesia Dengan Tiga Negara Lain**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Desember 2017, Volume 17, Nomor 4, Halaman 335 - 349

*Money laundering* adalah upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Apakah tindak pidana tersebut dapat berdiri sendiri atau tindak pidana yang bergantung pada tindak pidana yang lain? Artikel ini mengkaji pembuktian kejahatan *money laundering* dengan kajian yuridis normatif dan menganalisa Putusan MK No. 77/PUU-XII/2011 dengan menggunakan studi komparatif kejahatan *money laundering* di Negara Indonesia, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Putusan MK tersebut memperkuat dasar hukum bagi penegak hukum untuk menegakan hukum pidana dalam hal memberantas *money laundering*. Kesimpulannya kejahatan *money laundering* tidak dapat berdiri sendiri. Perbandingan kejahatan *money laundering* Indonesia, Belanda, Inggris dan Amerika menyimpulkan bahwa Kejahatan *money laundering* bukan merupakan tindak pidana asal. Demi terciptanya *Equality Before The Law* seharusnya Pemerintah dan DPR merevisi UU No. 8 Tahun 2010. Dalam praktik pemberantasan kejahatan *money laundering* di Indonesia seharusnya penegak hukum memperhatikan asas *presumption of innocent*.

**Kata Kunci: *Money Laundering*, Putusan MK, Perbandingan**



**Kata kunci bersumber dari artikel****Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya****Firdaus (Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)****Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Desember 2017, Volume 17, Nomor 4, Halaman 351 - 371

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama perkembangan transportasi, komunikasi, dan informasi mengakibatkan satu negara dengan negara lain seakan-akan tanpa batas sehingga perpindahan orang atau barang dari satu negara ke negara lain dilakukan dengan mudah dan cepat. Perkembangan ini menimbulkan dampak hukum pidana terhadap kejahatan dan modus operandinya semakin canggih sehingga penanggulangannya diperlukan kerjasama antara negara yang satu dengan negara lainnya. Upaya mengatasi permasalahan tersebut dengan menjalin hubungan bilateral yang baik dengan negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama, salah satunya dengan melakukan kerjasamabantuan timbal balik dan masalah pidana. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, tulisan ini untuk menjawab apa urgensi yang dilakukan ratifikasi dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana, dan untuk melihat apa substansi yang diatur dalam perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Tulisan difokuskan pada urgensi untuk mendukung pelaksanaan pengesahan bantuan timbal balik masalah pidana terkait pemberantasan narkotika dan tindakan terorisme dan substansi yang diatur dalam perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Rekomendasi dari tulisan ini, dapat segera meratifikasi perjanjian dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku, dan penguatan beberapa lembaga untuk mendukung pelaksanaan bantuan timbal balik hukum pidana antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran.

**Kata Kunci: Perjanjian, Bantuan, Timbal Balik Pidana****Muhar Junef (Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)****Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Desember 2017, Volume 17, Nomor 4, Halaman 373 - 390

Proses penegakan hukum atas pelanggaran penataan ruang merupakan hal yang sangat penting dalam revitalisasi peta rencana tata ruang. Salah satu masalah yang seringkali ditemukan dalam proses pelaksanaan rencana tata ruang adalah dalam proses penegakan hukumnya. Sebab banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu penataan ruang yang dibiarkan begitu saja. Akibatnya melegalkan pelanggaran tersebut dengan mengubah rencana tata ruang yang telah ada. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum dalam rangka penataan ruang saat ini, dan bagaimana mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan? Untuk mengkaji permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum dalam penataan ruang di Indonesia sudah ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang membaginya menjadi empat rezim yaitu rezim administrasi, perdata, tata usaha negara, dan pidana. Untuk mewujudkan tata ruang berkelanjutan adanya harmonisasi antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, juga keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penataan Ruang**

**Kata kunci bersumber dari artikel****Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya****Agus Surono (Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia)****Perlindungan Hak Korban Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Di Kabupaten Kendal**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Desember 2017, Volume 17, Nomor 4, Halaman 391 - 409

Secara yuridis UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, telah memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan, namun dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Kabupaten Kendal, masih banyak terjadi kesalahan administrasi yang pada akhirnya akan sangat merugikan masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan tol. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di 27 Desa di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, masih belum memperhatikan hak-hak korban dan bahkan cenderung terjadi intimidasi dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, serta juga terdapat berbagai kesalahan administrasi dalam tahap pengadaan tanahnya sehingga tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut: pertama, apakah sistem pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan tol sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah telah memberikan perlindungan hukum bagi korban? Kedua, bagaimanakah hak-hak korban pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol telah diberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan? Ketiga, apakah pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol di Kabupaten Kendal telah memberikan jaminan perlindungan hukum dan keadilan bagi korban? Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, dimana data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan didukung data hasil wawancara dan pengamatan langsung ketika penulis melakukan pendampingan kepada sebagian masyarakat korban pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Kabupaten Kendal, sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, bahwa sistem pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan tol sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah secara substansi telah memberikan perlindungan hukum bagi korban, yaitu terutama masyarakat yang berhak atas ganti kerugian, namun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan. Kedua, bahwa hak-hak korban pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol secara yuridis telah diberikan jaminan kepastian hukum dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, namun demikian dalam kenyataannya masih terdapat berbagai kesalahan administrasi yang sangat merugikan masyarakat terkena dampak pembangunan jalan tol. Ketiga, bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol di Kabupaten Kendal belum memberikan jaminan perlindungan hukum dan keadilan bagi korban. Adapun saran yang dapat dikemukakan meliputi sebagai berikut: pertama, perlu dilakukan sosialisasi terhadap peraturan pengadaan tanah sehingga masyarakat benar-benar memahami akan hak-haknya. Kedua, perlu pelibatan pengawas dari lembaga baik aparat penegak hukum agar dapat dilakukan pencegahan praktek kesalahan administrasi, manipulasi dan *markup*.

**Kata Kunci: Perlindungan, Hak Korban, Jalan Tol**

**Kata kunci bersumber dari artikel****Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya****Yuliana Primawardani & Arief Rianto Kurniawan (Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)****Pendekatan Humanis Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Selatan**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Desember 2017, Volume 17, Nomor 4, Halaman 411 - 427

Penanganan anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang berbeda dengan penanganan pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum lainnya. Hal ini dikarenakan perlu adanya pendekatan humanis dalam penanganannya yang berkaitan dengan perlindungan khusus yang dimiliki anak sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran secara umum mengenai penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan mengetahui kebijakan rehabilitasi (medis maupun sosial) diberikan kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, dilihat dari aspek penanganannya, dapat terlihat bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Anak belum diterapkan sebagaimana mestinya. Salah satu penyebabnya adalah adanya perbedaan persepsi antar para aparat penegak hukum yang berdampak kepada perbedaan penanganan anak penyalahguna narkoba. Selain itu juga Tim Asesmen Terpadu belum dapat terimplementasi dengan baik karena kurangnya peran Balai Pemasarakatan dalam Tim Asesmen Terpadu tersebut. Kedua, kebijakan Rehabilitasi pada anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba seringkali diberikan sebelum sampai tahap persidangan selama bukan merupakan perbuatan pengulangan. Selain itu, masih terdapat anak penyalahgunaan narkoba yang tidak mendapatkan kebijakan rehabilitasi dalam putusan hakim, sehingga harus mendapatkan pidana penjara. Oleh karena itu disarankan agar Rehabilitasi menjadi pendekatan Humanis dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak tanpa mengesampingkan penegakan hukum dengan tetap menempatkan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Selain itu juga dalam hal pembentukan Tim Asesmen Terpadu, hendaknya langsung menunjuk Balai Pemasarakatan sebagai anggota Tim Asesmen Terpadu sebagaimana Tugas dan fungsi bapas dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum adalah melakukan pendampingan dan pembimbingan anak.

**Kata Kunci: Pendekatan Humanis, Anak, Penyalahguna Narkoba**

## Kata kunci bersumber dari artikel

Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

**Insan Firdaus (Peneliti pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)**

### **Penempatan Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Desember 2017, Volume 17, Nomor 4, Halaman 429 - 443

Narapidana teroris dikategorikan sebagai narapidana *high risk* yang membutuhkan perlakuan dan pembinaan khusus, oleh sebab itu proses penempatan narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan harus dilakukan hati-hati karena hal tersebut akan berpengaruh pada keberhasilan pembinaan dan program deradikalisasi. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Pertama, apakah penempatan narapidana teroris sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku? Kedua, aspek apa yang harus dipertimbangkan dalam penempatan narapidana teroris di Lembaga Pemasyarakatan? Ketiga, apa hambatan dalam proses penempatan narapidana teroris?. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dan bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui gambaran tentang mekanisme penempatan narapidana teroris, aspek yang harus dipertimbangkan serta hambatannya. Penempatan narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang pemasyarakatan yaitu menggunakan pendekatan keamanan dan pembinaan yang dilakukan melalui proses *profiling* dan *assesment* dalam setiap tahapan penempatan. Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam penempatan narapidana teroris yaitu tingkat resiko dan radikalisme, pembinaan sumber daya manusia dan sarana prasarana lembaga pemasyarakatan. Sedangkan hambatannya antara lain over kapasitas, keterbatasan sumber daya petugas pemasyarakatan baik secara kuantitas dan kualitas serta sarana prasarana. Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa saran untuk Direktorat Jendral Pemasyarakatan antara lain, perlu peningkatan kompetensi petugas pemasyarakatan, peningkatan kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris, serta perlu didukung oleh sarana dan prasarana lembaga Pemasyarakatan yang memadai.

**Kata Kunci: Narapidana Teroris, Lembaga Pemasyarakatan**

**Evi Djuniarti (Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)**

### **Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Desember 2017, Volume 17, Nomor 4, Halaman 445– 461

Harta perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-istri, utamanya apabila mereka bercerai, sehingga Hukum Harta Perkawinan itu sudah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan keluarga bahkan sewaktu perkawinan masih berjalan mulus. Akan sulit dimengerti bagaimana kelangsungan suatu perkawinan apabila dalam perkawinan tersebut tidak didukung oleh adanya harta kekayaan. Mengingat begitu pentingnya harta benda keluarga dalam sebuah perkawinan maka penelitian ini ingin mengerahui bagaimana harta benda bersama ditinjau dari perspektif undang-undang perkawinan dan KUH Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, atau studi kepustakaan yakni suatu penelitian yang dilakukan atau didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang seharusnya. Penelitian ini menemukan bahwa. Menurut ketentuan undang-undang perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Secara yuridis formal dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami-istri yang didapatkan selama perkawinan. Sedangkan mneueut KUH Perdata berdasarkan Asas maritale macht, maka dalam Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata ditentukan bahwa, "Suami sendiri harus mengurus (beheren) sendiri harta kekayaan perkawinan, tanpa campur tangan istri, suami diperbolehkan menjual, memindahtangankan dan membeban. Kesimpulan dari penelitian yaitu harta benda punya hak masing-masing tidak bisa untuk dimiliki, tidak bisa digabung. Semua harta benda yang diperoleh dari pembawaan para pihak sebelum perkawinan dapat digunakan bersama untuk kepentingan bersama dalam rumah tangga.

**Kata Kunci: Hukum, Harta, Bersama**